



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Interaksi SYMLOG dalam Risalah Rapat Komisi III DPR dan PPATK

Mia Ayu Iswandiariwati^{1*}

¹Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, miayu14@gmail.com

*Corresponding Author: miayu14@gmail.com

Abstract: *This study analyzes interaction patterns in the Working Meeting between Commission III of the Indonesian House of Representatives and the Head of PPATK on March 21, 2023, using SYMLOG text analysis and Relational Dialectics Theory. The research aims to explore power dynamics, symbolic relations, and communicative actions within an institutional context. Analysis was conducted on the meeting minutes obtained from the official website of the Indonesian House of Representatives. Findings reveal significant dominance patterns, particularly from the Meeting Chair and several House members, while the PPATK Head tended to adopt a more submissive position. Complex interpersonal dynamics emerged, reflecting tensions between demands for transparency and the need to maintain sensitive information confidentiality. The study also identifies challenges in building consensus and balancing institutional roles with achieving common goals. These findings have important implications for efforts to improve governance and law enforcement in Indonesia, highlighting the need to strengthen checks and balances mechanisms, develop a constructive dialogue culture, and enhance inter-agency coordination capacity. This research contributes to a more comprehensive understanding of the complexities of interaction in legislative decision-making processes.*

Keywords: SYMLOG, Relational Dialectics, Institutional Interaction, DPR RI, PPATK

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pola interaksi dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK pada 21 Maret 2023, menggunakan metode analisis teks SYMLOG dan teori Dialektika Relasional. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi dinamika kekuasaan, relasi simbolik, dan tindakan komunikatif dalam konteks kelembagaan. Analisis dilakukan terhadap risalah rapat yang diperoleh dari website resmi DPR RI. Hasil penelitian mengungkapkan pola dominasi yang signifikan, terutama dari Ketua Rapat dan beberapa anggota DPR, sementara Kepala PPATK cenderung mengambil posisi yang lebih tunduk. Dinamika interpersonal yang kompleks terungkap, mencerminkan tegangan antara tuntutan transparansi dan kebutuhan menjaga kerahasiaan informasi sensitif. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam membangun konsensus dan menyeimbangkan peran kelembagaan dengan pencapaian tujuan bersama. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi upaya peningkatan tata kelola dan penegakan hukum di Indonesia, menyoroti perlunya penguatan mekanisme *checks and balances*, pengembangan budaya dialog yang konstruktif,

serta peningkatan kapasitas koordinasi antar lembaga. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas interaksi dalam pengambilan keputusan di tingkat legislatif.

Kata Kunci: SYMLOG, Dialektika Relasional, Interaksi Kelembagaan, DPR RI, PPATK

PENDAHULUAN

Pencucian uang merupakan tindak pidana yang melibatkan segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2010). Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme menjadi salah satu agenda prioritas dalam upaya penegakan hukum di Indonesia (Husein, 2018). Upaya ini semakin penting mengingat kompleksitas dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan (Irwin, Kim-Kwang, & Liu, 2012). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sesuai dengan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 39 (PPATK, 2020). Kerjasama yang erat antara PPATK dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sangat penting untuk memastikan efektivitas upaya pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme (Siahaan, 2016). Kolaborasi antar lembaga ini menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pemberantasan pencucian uang di era digital yang semakin kompleks (Saputra, Purnawan, & Karjoko, 2019).

Dalam rangka memperkuat kerjasama tersebut, Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, secara rutin mengadakan rapat kerja dengan PPATK sebagai salah satu mitra kerjanya (DPR RI). Rapat kerja ini bertujuan untuk membahas berbagai isu terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta untuk memantau kinerja PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Sukmana, 2019). Proses pengawasan ini menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan pencucian uang di era digital (Sihombing & Rahardjo, 2019). Salah satu agenda penting dalam rapat kerja ini adalah pembahasan mengenai transaksi keuangan mencurigakan yang teridentifikasi di lingkungan kementerian/lembaga (K/L) pemerintah.

Interaksi antara anggota Komisi III DPR RI dan Kepala PPATK dalam rapat kerja ini menjadi isu utama yang sangat penting, karena dapat mencerminkan dinamika kekuasaan, relasi simbolik, tindakan komunikatif seperti bahasa, gestur, sikap yang terjadi selama rapat kerja dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Emosi seperti ketegangan atau kemarahan dapat terjadi dalam interaksi antara para pihak yang terlibat, yang akhirnya dapat memengaruhi pola komunikasi dan dinamika dalam rapat kerja tersebut (Tracy & Robles, 2013). Permasalahan atau isu-isu yang menjadi subjek perdebatan antara anggota Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK seringkali muncul, seperti rekam jejak dan integritas pejabat/pegawai yang terlibat dalam transaksi mencurigakan, adanya dugaan keberpihakan politik dalam penanganan kasus, keakuratan dan validitas data atau bukti transaksi mencurigakan, serta koordinasi dan tindak lanjut hasil analisis PPATK dengan aparat penegak hukum (Widodo, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pola interaksi yang terjadi dalam rapat kerja tersebut, seperti cenderung kooperatif, kompetitif, atau ada unsur konfrontasi, dengan menggunakan metode analisis teks SYMLOG (*Systematic Multiple Level Observation of Groups*) dan teori dialektika relasional. SYMLOG merupakan teori kepribadian dan

dinamika kelompok yang mencakup metode untuk mengukur interaksi kelompok (Bales & Cohen, 1979). Sementara itu, teori dialektika relasional yang dikembangkan oleh Baxter dan Montgomery berfokus pada bagaimana dua orang dalam hubungan merespons konflik dan perbedaan dalam upaya untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan mereka (Baxter & Braithwaite, 2008).

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan metode SYMLOG yang belum banyak diterapkan dalam menganalisis wacana, terlebih terkait dengan rapat kerja di DPR RI, utamanya Komisi III. Dengan mengeksplorasi risalah rapat secara mendalam, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor seperti kekuasaan, keramahan, dan orientasi tugas memengaruhi interaksi antara ketua rapat, anggota Komisi III DPR RI, dan Kepala PPATK dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK.

Penelitian ini akan mengeksplorasi pertanyaan penelitian tentang bagaimana pola interaksi yang terjalin antara ketua rapat, anggota Komisi III DPR RI, dan Kepala PPATK tercermin dalam risalah rapat pada tanggal 21 Maret 2023. Dengan menggunakan metode analisis teks SYMLOG, peneliti akan mengeksplorasi dimensi-dimensi perilaku seperti dominasi, keramahan, dan orientasi tugas atau ekspresi yang memengaruhi interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dalam rapat tersebut (Keyton & Wall, 1989). Isu utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor seperti kekuasaan, keramahan, dan orientasi tugas berperan dalam menciptakan pola interaksi yang terjadi dan bagaimana mereka saling memengaruhi dalam konteks rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana interaksi yang terjalin antara anggota Komisi III DPR RI dan Kepala PPATK berlangsung, serta dampaknya terhadap upaya penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Pendekatan post-positivis yang menggabungkan analisis teks menggunakan metode SYMLOG dengan kerangka teoritis yang mendalam diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami pola interaksi yang terjadi dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan PPATK (Littlejohn, Foss, & Oetzel, 2017).

Teori SYMLOG merupakan integrasi dari beberapa teori kognisi sosial yang berbeda, seperti Teori Keseimbangan dari Fritz Heider, Teori Disonansi Kognitif dari Leon Festinger, Teori Atribusi dari Harold H. Kelley, Teori Pertukaran Sosial dari Harold H. Kelley, Teori Interaksionisme Simbolik dari George Herbert Mead, Teori Pertukaran Sosial (Thibaut & Kelley, Blau dan Homans), Teori Tindakan oleh Talcott Parsons (1951a, 1951b), dan Pendekatan Terhadap Terapi Keluarga/ *Family System Therapy* (Murray, Bowen, Salvador, Minuchin), serta yang paling penting adalah Teori *Psychoanalysis* dan Teori Lapangan Kurt Lewin (Titscher, Meyer, Wodak, & Vetter, 2000). Bales menyebut teori SYMLOG ini sebagai "*A New Field Theory*" karena teori ini menjelaskan fakta bahwa semua perilaku terjadi dalam suatu konteks (Bales, 1984). Teori SYMLOG bersifat multilevel karena memperhitungkan baik dinamika kelompok maupun dinamika kepribadian individu, dan memfasilitasi wawasan sistematis mengenai hubungan antara dinamika kepribadian dan dinamika bidang sosial (Titscher, Meyer, Wodak, & Vetter, 2000).

Teori SYMLOG didasarkan pada tiga dimensi perilaku bipolar yang terdiri dari ruang kubik tiga dimensi (Bales, 1985). Tiga dimensi *orthogonal* yang membentuk ruang SYMLOG adalah *Dominant vs Submissive (Upward-Downward)* yang mengacu pada dominasi, *Friendly vs Unfriendly (Positive-Negative)* yang mengacu pada keramahan perilaku seseorang, dan *Acceptance of authority (task oriented) vs Non-acceptance of authority (Forward-Backward)* yang mengacu pada orientasi tugas atau ekspresi emosional dari perilaku seseorang (Keyton & Wall, 1989).

Teori Dialektika Relasional merupakan teori komunikasi interpersonal yang digunakan untuk menggali dinamika konflik dan ketegangan dalam hubungan interpersonal. Teori yang

dikembangkan oleh Leslie Baxter dan Barbara Montgomery ini berfokus pada bagaimana dua orang dalam hubungan (pertemanan/pasangan/dll) merespons konflik dan perbedaan dalam upaya untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan mereka. Teori ini memperkenalkan konsep "dialektika relasional", yakni bagaimana kita merespon kontradiksi atau ketegangan yang ada dalam hubungan interpersonal. Dialektika merujuk pada konflik yang muncul saat individu-individu dalam hubungan merasa terjebak diantara berbagai kontradiksi, misalnya: tuntutan persatuan (kebutuhan untuk bersama) dan tuntutan otonomi (kebutuhan untuk menjadi individu yang independen). Terdapat empat konsep yang menjadi sudut pandang Baxter dalam melihat proses dialog relasional, yaitu gagasan tentang diri sendiri, orang lain, dan hubungan dibangun dalam pembicaraan yang terjadi dalam beberapa cara; kita mengelola interaksi dinamis antara nilai kontradiksi yang diistilahkan sebagai "kekuatan" / "*forces*" melalui dialog; nilai estetika pada hubungan yang melibatkan rasa keseimbangan, koherensi, bentuk, dan keutuhan; serta gagasan bahwa hasil praktis dan estetis bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri namun diciptakan melalui komunikasi (Littlejohn, Foss, & Oetzel, 2017).

Teori Dialektika Relasional mengidentifikasi tiga dialektika utama yang muncul dalam hubungan interpersonal, yaitu *integration-separation* (konflik antara keinginan untuk merasa dekat sebagai kesatuan dan keinginan untuk menjauh), *expression-non expression* (konflik antara keinginan untuk berbagi secara terbuka dengan pasangan dan keinginan untuk menjaga privasi atau batasan dalam komunikasi), dan *stability-change* (konflik antara keinginan untuk menjadi terprediksi dan konsisten serta keinginan untuk menjadi spontan dan berbeda). Teori ini percaya bahwa konflik adalah bagian alami dan tidak dapat dihindari bahkan penting dalam sebuah hubungan dan dapat memiliki dampak yang baik jika dikelola dengan baik. Teori Dialektika Relasional memiliki kekuatan, diantaranya dapat menjabarkan kompleksitas dalam proses pembentukan makna, berpusat langsung pada rumpun ilmu komunikasi, dan bersifat *heuristic* atau menjelaskan "proses" sehingga berguna bagi pemahaman terkait dengan komunikasi. Namun, teori ini juga memiliki keterbatasan, diantaranya yaitu banyak dikritisi atas kegagalannya dalam memprediksi tentang komunikasi dalam sebuah hubungan, cocok dengan paradigma post-positivis dan kurang cocok jika digunakan dalam paradigma interpretatif, serta kurangnya pembaharuan atau perkembangan atas konsep dari teori ini (Baxter & Braithwaite, 2008).

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis yang menolak asumsi-asumsi ketat positivisme sambil terus menjunjung tinggi validasi empiris, objektivitas, dan penyelidikan bebas nilai sebagai tujuan pragmatis yang harus dikejar oleh teori ilmiah sejauh mungkin (Littlejohn & Foss, 2009). Paradigma post-positivis dipandang tepat untuk penelitian ini karena memberikan kerangka kerja yang lebih fleksibel dan terbuka terhadap interpretasi yang lebih subjektif dalam menganalisis pola interaksi dalam konteks rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap dinamika komunikasi dan relasi kekuasaan yang kompleks dalam konteks kelembagaan (Tracy & Hinrichs, 2017).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tekstual SYMLOG, yang bertujuan untuk mempelajari kelompok-kelompok dari berbagai jenis, tetapi pada dasarnya kelompok kecil yang alami, seperti keluarga, tim atau kelompok kelas, dimana kepribadian orang-orang tertentu yang terlibat dan hubungan mereka satu sama lain menjadi fokus perhatian (Bales & Cohen, 1979). SYMLOG menyediakan prosedur pengkodean yang menggabungkan perilaku, konten, dan nilai dalam bentuk 'pesan' dalam bentuk pengkodean, yang mencatat variabel-variabel seperti waktu interaksi, nama aktor, nama penerima, komentar bahasa sederhana tentang perilaku, atau ringkasan ide yang diekspresikan secara linguistik, nilai yang diekspresikan oleh aktor terhadap ide, pengkodean orientasi perilaku dalam ruang

SYMLOG atau pengkodean orientasi ide dalam ruang SYMLOG, dan alokasi ide ke salah satu dari enam kelas konten (Titscher, Meyer, Wodak, & Vetter, 2000). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika komunikasi dan interaksi dalam konteks kelembagaan, yang sangat relevan untuk memahami proses pengambilan keputusan di tingkat legislatif (Prasetyo, Suhardjanto, Hananto, & Setiawan, 2021).

Teks yang dianalisis merupakan Manuskrip Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada Selasa, 21 Maret 2023 yang diambil pada laman resmi Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI, 2021). Isu utama yang menjadi fokus analisisnya adalah pola interaksi yang terlihat antara pihak-pihak yang terlibat dalam rapat kerja, terutama dalam konteks dinamika kekuasaan, relasi simbolik, dan juga tindakan komunikatif yang terjadi selama rapat kerja tersebut berlangsung.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis terhadap teks Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada Selasa, 21 Maret 2023 yang diambil pada laman resmi Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI, 2021). Peneliti akan mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari secara menyeluruh teks risalah rapat kerja tersebut. Data-data yang relevan dengan penelitian akan dipilih dan diekstraksi untuk dilakukan analisis sesuai dengan rumusan masalah dan juga tujuan penelitian yang telah disusun.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah lembar koding yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis teks sesuai dengan Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada Selasa, 21 Maret 2023. Lembar koding ini terdiri dari *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* yang mengacu pada metode SYMLOG dan Teori Dialektika Relasional.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tekstual SYMLOG sebagai alat untuk menganalisis interaksi antara ketua rapat, anggota Komisi III DPR RI, dan kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang tercermin dalam risalah rapat tersebut. Tahap analisis yang akan dilakukan oleh peneliti meliputi identifikasi dimensi SYMLOG yang terdiri dari dominasi, keramahan perilaku, dan juga orientasi tugas atau ekspresi, pengumpulan data yang relevan, melakukan coding data, menganalisis pola interaksi yang terjadi, menganalisis bagaimana simbol, makna dan interpretasi sosial mempengaruhi pola interaksi, menempatkan aktor-aktor yang ada sesuai dengan pola interaksi yang telah dianalisis sebelumnya, dan merepresentasikan hasil analisis untuk mengilustrasikan pola interaksi yang terjadi antara aktor-aktor yang ada (Strauss & Corbin, 2003).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, diantaranya pengkodean (coding data) yang terdiri dari *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* (Strauss & Corbin, 2003), interpretasi data yang berfokus pada posisi aktor yang mencerminkan pola interaksi dan perilaku masing-masing aktor dalam rapat (Bales, 1985), pola interaksi yang teridentifikasi, apakah cenderung kooperatif, kompetitif, atau otoriter, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Keyton & Wall, 1989), serta simbol, makna, dan interpretasi sosial yang muncul dalam interaksi, dan pengaruhnya terhadap dinamika rapat (Littlejohn, Foss, & Oetzel, 2017).

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data serta hasil analisis, peneliti menggunakan teknik validasi data yaitu triangulasi sumber data (Creswell, 2009). Triangulasi sumber data melibatkan perbandingan data dari berbagai sumber untuk mengecek konsistensi informasi. Dalam konteks penelitian ini, peneliti membandingkan data dari dua sumber utama, yaitu Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang tersedia di website resmi DPR RI (2021) dan Video Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK yang diunggah pada platform YouTube oleh akun resmi DPR RI (2023).

Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk kombinasi narasi dengan struktur yang terdiri dari deskripsi konteks rapat dan profil singkat aktor yang terlibat, yang menunjukkan kategori-kategori dan hubungannya sesuai dimensi SYMLOG serta keterkaitannya dengan Teori Dialektika Relasional, disertai dengan narasi interpretatif tentang pola interaksi dan perilaku masing-masing aktor, pembahasan tentang simbol dan makna yang muncul, serta dinamika kekuasaan dalam rapat, dan kesimpulan serta refleksi teoritis terkait temuan penelitian dan kontribusinya pada pemahaman tentang interaksi dalam konteks rapat kerja (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subjek penelitian ini adalah risalah rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK yang dilaksanakan pada 21 Maret 2023. Risalah ini merupakan dokumen tertulis yang merangkum jalannya rapat, termasuk agenda, daftar peserta, topik yang dibahas, pertanyaan yang diajukan, tanggapan dari peserta rapat, serta kesimpulan atau keputusan yang diambil. Risalah rapat diperoleh dari website resmi DPR RI (DPR RI, 2021) pada tanggal 24 April 2024. Dokumen ini terdiri dari 59 halaman dan disusun sesuai dengan urutan waktu selama rapat berlangsung.

Analisis interaksi dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK menggunakan metode SYMLOG dan teori Dialektika Relasional mengungkapkan beberapa tema utama, meliputi pola dominasi dan relasi kekuasaan, dinamika interpersonal dan pengelolaan konflik, serta akuntabilitas dan transparansi dalam konteks peran kelembagaan.

Pola Dominasi dan Relasi Kekuasaan

Hasil analisis menunjukkan adanya pola dominasi yang signifikan dalam interaksi selama Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK. Perilaku dominan terutama terlihat pada AS (Ketua Rapat) dan beberapa anggota DPR seperti DJM, BKH, AD, HIP, dan AS (F-PPP) yang mengendalikan arah dan dinamika diskusi. AS (F-PPP) juga menunjukkan perilaku dominan dalam mengarahkan rapat dan menegaskan aturan terkait kewenangan PPATK. Berikut pernyataannya.

“Kami ingin meminta persetujuan sama anggota, apakah rapat ini bisa selesai pukul 17? Setuju kan? Hah, kalau kurang tambah, ya?” – AS (Ketua Rapat)

Di sisi lain, (IY) Kepala PPATK cenderung mengambil posisi yang lebih tunduk terhadap arahan ketua rapat dan anggota DPR. Berikut pernyataannya.

“Saya ikut Pimpinan saja” – IY (Kepala PPATK)

Pola dominasi yang terungkap dalam rapat ini mencerminkan dinamika kekuasaan yang kompleks dalam konteks kelembagaan, di mana posisi formal otoritas institusional memainkan peran penting dalam membentuk interaksi (Purwanto, Suhardi, & Ramdani, 2020).

Pola ini merefleksikan relasi kekuasaan yang tidak seimbang, di mana DPR, yang diwakili oleh ketua rapat dan beberapa anggota, memiliki otoritas lebih besar dalam mengatur jalannya rapat. Temuan ini selaras dengan peran konstitusional DPR sebagai lembaga pengawas yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari lembaga eksekutif, termasuk PPATK.

Namun, dominasi ini tidak bersifat absolut. Kepala PPATK juga menunjukkan perilaku asertif dalam mengklarifikasi jawaban dan mempertahankan sikap kehati-hatian dalam mengungkap informasi tertentu. Hal ini mencerminkan upaya PPATK untuk mempertahankan

integritas kelembagaan dan menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan mandatnya. Berikut pernyataannya.

“Untuk kasus ini sudah kami sampaikan melalui Pak Menseskab” – IY (Kepala PPATK)

Dinamika dominasi dan relasi kekuasaan yang terungkap dalam rapat ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara cabang legislatif dan lembaga independen seperti PPATK. Meskipun DPR memiliki kewenangan pengawasan, PPATK juga memiliki otonomi yang dijamin oleh undang-undang. Keseimbangan antara akuntabilitas dan independensi menjadi tantangan yang harus dinegosiasikan secara terus-menerus dalam interaksi kelembagaan semacam ini. Dinamika kekuasaan yang terungkap dalam rapat ini juga mencerminkan kompleksitas hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga independen dalam sistem tata kelola Indonesia, yang sering kali diwarnai oleh Tarik-menarik kepentingan dan otoritas (Hidayat & Ridwan, 2020).

Dinamika Interpersonal dan Pengelolaan Konflik

Analisis terhadap pola interaksi dalam rapat juga mengungkap adanya dinamika interpersonal yang kompleks, terutama dalam hal pengelolaan konflik dan perbedaan pendapat. Beberapa anggota DPR, seperti AD, HW, dan HAB, mengambil pendekatan yang lebih konfrontatif dalam mengajukan kritik dan mendorong perubahan. Berikut pernyataannya.

“Saya jadi curiga sama Pak Ketua ini” – AD (F-PDIP)

Sementara itu, aktor lain seperti AS (Ketua Rapat) berupaya mencari titik kompromi untuk menengahi perbedaan dan menjaga produktivitas rapat. Berikut pernyataannya.

“Temen-temen, kalau ini agak sensitif, bagaimana kita rapatnya tertutup saja” – AS (Ketua Rapat)

Perbedaan gaya komunikasi dan pendekatan ini mencerminkan keragaman latar belakang, kepentingan, dan preferensi individual dalam konteks kelembagaan. Temuan ini selaras dengan teori dialektika relasional yang menekankan adanya tegangan yang melekat dalam setiap hubungan, termasuk dalam konteks profesional. Tegangan antara ekspresi dan *non-ekspresi*, antara otonomi dan keterikatan, serta antara stabilitas dan perubahan mewarnai dinamika interaksi dalam rapat.

Keragaman gaya komunikasi dan pendekatan dalam mengelola konflik yang terlihat dalam rapat ini sejalan dengan temuan penelitian terkini tentang kompleksitas komunikasi organisasi dalam konteks kelembagaan di Indonesia (Wahyuni & Hasanah, 2021).

Menariknya, upaya ketua rapat untuk menengahi perbedaan dan mencari kompromi tidak selalu mendapat dukungan yang solid dari peserta lain. Hal ini menyiratkan adanya tantangan dalam membangun konsensus, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu yang memiliki implikasi politis dan kelembagaan yang signifikan. Berikut pernyataannya.

“Pimpinan harus bisa menjalankan kepemimpinan dengan baik” – AD (F-PDIP)

Pengelolaan konflik yang efektif menjadi kunci dalam menjaga produktivitas dan kohesivitas dalam konteks rapat semacam ini. Diperlukan upaya yang lebih konsisten dan terstruktur untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif, mengedepankan pemahaman bersama, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pengembangan keterampilan komunikasi interpersonal, seperti mendengarkan secara aktif, menunjukkan empati, dan

menyusun argumen secara objektif, dapat membantu dalam menciptakan dinamika yang lebih kolaboratif, bahkan dalam menghadapi kritik dan pendekatan konfrontatif seperti yang ditunjukkan oleh HAB. Berikut pernyataannya.

“Jangan sampai gara-gara kesalahan anda-anda para pejabat keuangan di Republik ini, mengganggu pembayaran pajak di negara kita. Itu perhatian” – HAB (F-PKS)

Akuntabilitas, Transparansi, dan Kepentingan Publik

Isu akuntabilitas dan transparansi menjadi tema yang menonjol dalam pembahasan selama rapat. Anggota DPR yang mengambil pendekatan interogasi, secara aktif menuntut klarifikasi dan penjelasan dari PPATK terkait temuan dugaan tindak pidana pencucian uang. Perilaku ini mencerminkan upaya DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan bahwa lembaga-lembaga publik bertanggung jawab atas tindakan mereka. Berikut pernyataannya.

“Yang saya tanyakan, dari hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang Saudara laporkan Kementerian Keuangan, sudah berapa yang ditindaklanjuti? Yang sudah ditemukan tindak pidana asalnya?” - SS (F-PAN)

Namun, tuntutan akan transparansi ini juga dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif. Kepala PPATK (IY) berupaya menyeimbangkan antara pemberian informasi yang memadai dengan perlindungan terhadap data-data yang berpotensi mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Dilema ini mencerminkan tantangan yang dihadapi lembaga penegak hukum dalam era keterbukaan informasi, di mana ekspektasi publik akan transparansi harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip kerahasiaan penyelidikan. Berikut pernyataannya.

“Nggih, saya..., saya tidak punya informasi” – IY (Kepala PPATK)

Dinamika ini juga memunculkan pertanyaan tentang batas-batas kewenangan dan domain tanggung jawab masing-masing lembaga. Beberapa anggota DPR, mempertanyakan independensi PPATK dan menyuarakan kekhawatiran tentang potensi intervensi politik dalam penanganan kasus. Berikut pernyataannya.

“Jadi, laporan ini menurut saya tidak ada artinya ini dan tampaknya PPATK kena tekanan yang sungguh luar biasa, yang kita tidak tahu siapa yang menekannya, gitu – S (F-PD)”

Di sisi lain, PPATK berupaya menegaskan otoritasnya sebagai lembaga independen yang tunduk pada aturan hukum. Berikut pernyataannya.

“Jika kalau kemudian kami temukan korupsi, kami akan serahkan kepada KPK atau penyidik Kepolisian atau Kejaksaan” – IY (Kepala PPATK)

Keseimbangan antara akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan kepentingan publik menjadi tantangan yang kompleks dalam konteks kelembagaan. Diperlukan mekanisme *checks and balances* yang jelas dan efektif untuk memastikan bahwa setiap lembaga dapat menjalankan mandatnya secara optimal, tanpa mengorbankan integritas proses hukum atau kepercayaan publik.

Tantangan dalam menyeimbangkan tuntutan transparansi dengan kebutuhan menjaga kerahasiaan informasi sensitif mencerminkan dilema yang sering dihadapi lembaga penegak hukum di era keterbukaan informasi (Setiyono & McLeod, 2019).

Dialog yang konstruktif dan kerjasama antar lembaga, dengan mempertimbangkan peran dan pendekatan masing-masing aktor seperti HAB, menjadi kunci dalam menavigasi dilema ini. Hanya dengan upaya kolaboratif dan saling pengertian, keseimbangan antara akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan kepentingan publik dapat dijaga dengan baik. Berikut pernyataannya.

“Oleh karenanya, saya minta ketegasan dari Pak Ivan, Ketua PPATK, untuk memberikan pernyataan yang clear, data 349 ini bermasalah apa tidak ya. jika bermasalah, kaitanya dengan apaan sih, gitu. Korupsikah? TPPU-kah, yang ditanyakan Ketua tadi. penggelapan pajak kah, supaya jelas. Jadi, jenis kelaminnya ini hamba Allah satu ini biar clear, ya, apa gitu?” – HAB (F-PKS)

Tantangan dalam menyeimbangkan akuntabilitas dan efektivitas operasional lembaga penegak hukum seperti PPATK mencerminkan dilema yang umum dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang di negara berkembang (Sujana, Yasa, & Wahyuni, 2020).

Peran Kelembagaan dan Pencapaian Tujuan Bersama

Analisis terhadap pola interaksi dalam rapat juga mengungkap adanya tarik-menarik antara penegasan peran kelembagaan dan upaya pencapaian tujuan bersama. Anggota DPR, seperti AD, secara eksplisit menekankan posisi dan kewenangan DPR dalam mengawasi kinerja lembaga-lembaga seperti PPATK. Berikut pernyataannya.

“Kerja-kerja PPATK selalu saya apresiasi, tapi cara PPATK bekerja, cara PPATK menyampaikan, meng-counter isu, mohon maaf, harus kami koreksi.” – AD (F-PDIP)

AS (F-PPP) juga menunjukkan perilaku dominan dalam menegaskan aturan terkait kewenangan PPATK. Berikut pernyataannya.

“Jadi, sekali lagi yang mau saya sampaikan, Pak Ivan itu boleh dan teman-teman PPATK hanya kepada Presiden dan DPR. Kepada Menteri saja tidak boleh. Menko apa punlah.” – AS (F-PPP)

Di sisi lain, Kepala PPATK berupaya menunjukkan komitmen untuk memenuhi tanggung jawab kelembagaannya dengan memberikan penjelasan yang diminta. Berikut pernyataannya.

“Bisa, tapi sekarang karena sudah..., sudah kita ke Ketua Komite, beberapa kali dalam..., case per case kita pernah serahkan kepada Komisi III. Ya.” – IY (Kepala PPATK)

Dinamika ini mencerminkan kompleksitas relasi antar lembaga dalam sistem tata kelola yang demokratis. Setiap lembaga memiliki mandat dan domain otoritas yang spesifik, yang terkadang dapat menimbulkan ketegangan atau tumpang tindih. Namun, pada akhirnya, semua lembaga negara diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menegakkan hukum, menjaga kepentingan publik, dan memastikan tata kelola yang baik.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama ini memerlukan adanya pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga, serta komitmen untuk

mengedepankan dialog dan kerjasama yang konstruktif. Penegasan wewenang kelembagaan harus diimbangi dengan kesediaan untuk mendengarkan perspektif pihak lain dan mencari titik temu, seperti yang diupayakan oleh Kepala PPATK. Berikut pernyataannya.

“Jadi, jika kemudian terjadi korupsi di internal Kementerian Keuangan, kita tidak akan sampaikan hasil analisisnya kepada Kementerian Keuangan karena Kementerian Keuangan bukan penyidik tindak pidana asal hasil analisis seperti RHT – IY” (Kepala PPATK)

Hanya dengan pendekatan yang seimbang dan inklusif, kompleksitas tantangan yang dihadapi dapat diatasi secara efektif.

Implikasi terhadap Tata Kelola dan Penegakan Hukum

Hasil analisis terhadap dinamika interaksi dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK memiliki implikasi penting bagi upaya peningkatan tata kelola dan penegakan hukum di Indonesia. Temuan menunjukkan adanya kompleksitas dalam relasi antar lembaga, yang melibatkan dimensi kekuasaan, akuntabilitas, transparansi, dan pencapaian tujuan bersama.

Pola dominasi dan relasi kekuasaan yang terungkap dalam rapat menyoroti perlunya penguatan mekanisme *checks and balances* yang efektif antara cabang legislatif dan lembaga-lembaga independen. Kejelasan tentang batas-batas kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan dapat membantu mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan atau intervensi politik yang tidak semestinya. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terkini yang menekankan pentingnya kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat dalam mendukung efektivitas upaya anti-korupsi dan anti-pencucian uang (Arsyad & Sodiq, 2021).

Dinamika interpersonal dan tantangan dalam membangun konsensus yang terlihat selama rapat juga menunjukkan perlunya pengembangan budaya dialog yang lebih konstruktif dan inklusif di antara para pemangku kepentingan. Penguatan kapasitas komunikasi interpersonal, manajemen konflik, dan pembuatan keputusan partisipatif dapat membantu menciptakan lingkungan kelembagaan yang lebih kondusif untuk kerjasama dan pencapaian tujuan bersama.

Tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi yang muncul dalam pembahasan menyoroti pentingnya memperkuat mekanisme pengawasan dan keterbukaan informasi publik. Namun, upaya ini juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap integritas proses hukum dan kerahasiaan informasi yang sensitif. Diperlukan panduan yang jelas dan protokol yang terstandarisasi untuk mengatur pertukaran informasi antar lembaga, sehingga kepentingan publik dapat dijaga tanpa mengorbankan efektivitas penegakan hukum. Pengembangan sistem informasi terintegrasi antar lembaga penegak hukum dapat menjadi solusi dalam meningkatkan efektivitas koordinasi dan pertukaran informasi, seperti yang telah ditetapkan di beberapa negara dengan hasil yang positif (Widiastuti, Sukoharsono, Irianto, & Baridwan, 2019).

Akhirnya, kompleksitas relasi kelembagaan dan tantangan dalam mencapai tujuan bersama yang terungkap dalam analisis menunjukkan perlunya penguatan kapasitas koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Pengembangan mekanisme komunikasi yang efektif, pertukaran informasi yang teratur, dan penyelarasan strategi dapat membantu memastikan bahwa setiap lembaga dapat berkontribusi secara optimal dalam kerangka tata kelola yang holistik.

Dengan mempertimbangkan implikasi ini, para pemangku kepentingan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem tata kelola dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dapat melibatkan reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan mekanisme pengawasan, dan promosi budaya transparansi dan akuntabilitas. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan

kolaboratif, dengan melibatkan semua pihak terkait, tantangan kompleks yang dihadapi dapat diatasi secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada Manuskrip Risalah Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK, dapat disimpulkan bahwa terdapat pola interaksi yang kompleks dan dinamis antara peserta rapat. Beberapa aktor, termasuk Ketua Rapat dan beberapa anggota DPR, cenderung dominan dalam mengarahkan jalannya rapat, sementara Kepala PPATK cenderung mengikuti arahan tersebut. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan peran dan dinamika kekuasaan di antara peserta rapat.

Dalam merespons pertanyaan, Kepala PPATK dan beberapa anggota DPR menunjukkan keramahan dan keterbukaan, meskipun Kepala PPATK juga menunjukkan sikap melindungi diri dalam beberapa situasi. Beberapa anggota DPR fokus pada substansi masalah dan berupaya mencari solusi, sementara yang lain lebih menekankan pada perbedaan pendapat. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan kompleksitas proses pengambilan keputusan dalam konteks kelembagaan, di mana berbagai kepentingan dan perspektif harus dinegosiasikan (Sofi & Mutiarin, 2018).

Pengambilan keputusan dalam rapat ini cenderung partisipatif, dengan banyak anggota DPR yang secara terbuka mengekspresikan pandangan mereka. Namun, beberapa anggota DPR juga mengkritik dengan cara yang kurang ramah, sementara yang lain lebih menekankan stabilitas.

Dukungan terhadap ide dan gagasan ditunjukkan oleh beberapa peserta rapat, sementara yang lain fokus pada pemosisian diri. Orientasi pada penyelesaian tugas rapat ditunjukkan oleh Kepala PPATK melalui komitmen untuk memberikan informasi yang diminta, sementara beberapa anggota DPR menekankan pada otonomi kelembagaan.

Secara keseluruhan, analisis ini mengungkapkan peran dan kontribusi beragam dari masing-masing aktor dalam dinamika rapat. Beberapa aktor berperan sebagai pemimpin yang dominan, peserta yang kritis, pemberi informasi, serta pendorong perubahan atau stabilisasi. Temuan ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas interaksi dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dalam konteks rapat tersebut. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam konteks kelembagaan, serta untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan di tingkat legislatif (Nugroho & Supriyanto, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dapat diajukan. Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas cakupan dengan menganalisis lebih banyak risalah rapat dari berbagai periode waktu atau dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, serta mempertimbangkan penggunaan metode analisis yang berbeda seperti analisis wacana kritis atau pendekatan etnografi. Eksplorasi faktor-faktor kontekstual yang lebih luas, seperti dinamika politik dan pengaruh opini publik, juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pola interaksi dalam rapat-rapat kelembagaan. Selain itu, melakukan studi komparatif antara berbagai lembaga atau dalam rentang waktu yang berbeda dapat memberikan wawasan tentang perbedaan atau kesamaan pola interaksi di berbagai konteks kelembagaan. Terakhir, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi implikasi pola interaksi yang terungkap terhadap efektivitas kelembagaan secara keseluruhan, termasuk dalam hal koordinasi, pengambilan keputusan, dan pencapaian tujuan bersama. Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan arah bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam mengungkap dinamika interaksi kelembagaan secara lebih mendalam dan komprehensif, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada upaya peningkatan efektivitas komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan dalam konteks hubungan antar lembaga di Indonesia.

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak pola interaksi yang terungkap dalam rapat kerja terhadap efektivitas implementasi kebijakan anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme. Analisis longitudinal terhadap perubahan pola interaksi antar lembaga dari waktu ke waktu juga dapat memberikan wawasan berharga tentang evolusi tata kelola dan penegakan hukum di Indonesia (Rahmanurrasjid, Sulistiyono, & Rifai, 2021).

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dr. Fitria Angeliqa, M.Si. atas bimbingan yang diberikan sejak awal penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Digital yang telah mendukung penelitian ini melalui Program Beasiswa S2.

REFERENSI

- Arsyad, L. O., & Sodiq, A. (2021). The effect of good governance implementation and apparatus competence on prevention of corruption in Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(1), 11-21.
- Bales, R. F. (1984). *Texts for 'YOURVIEW', and interactive computer program*. San Diego: SYMLOG Consulting Group.
- Bales, R. F. (1985). The new field theory in social psychology. *International Journal of Small Group Research*, 1(1), 1-18.
- Bales, R. F., & Cohen, S. P. (1979). *SYMLOG: A system for the multiple level observation of groups*. New York: Free Press.
- Baxter, L. A., & Braithwaite, D. O. (2008). *Engaging Theories in Interpersonal Communication: Multiple Perspectives*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2009). *RESEARCH DESIGN: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Third Edition*. London: SAGE Publications.
- DPR RI. (2021). *RISALAH KOMISI III DPR RI RAPAT KERJA DENGAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)*. Jakarta. Dipetik April 24, 2024, dari <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Laporan-Singkat-Komisi-III>
- DPR RI. (2023, Maret 21). *Live Streaming - Komisi III DPR RI Rapat Kerja dengan PPATK*. Dipetik April 25, 2024, dari Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=DaFCMEadDoc>
- DPR RI. (t.thn.). Tentang Komisi III. hal. <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-III>.
- Hidayat, R., & Ridwan, R. (2020). Political dynamics and the effectiveness of anti-corruption institutions in Indonesia. *Asian Education and Development Studies*, 9(2), 157-168.
- Husein, Y. (2018). Strategi memberantas tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(3), 39-51.
- Irwin, A. S., Kim-Kwang, R. C., & Liu, L. (2012). An analysis of money laundering and terrorism financing typologies. *Journal of Money Laundering Control*, <https://doi.org/10.1108/13685201211194745>.
- Keyton, J., & Wall, V. D. (1989). Symlog: Theory and Method for Measuring Group and Organizational Communication. *Management Communication Quarterly*, <https://doi.org/10.1177/0893318989002004006>.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Encyclopedia of Communication Theory*. London: SAGE Publication.
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2017). *Theories of Human Communication: Eleventh Edition*. United States: Waveland Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.

- Nugroho, R. D., & Supriyanto, A. (2020). The influence of organizational communication and work motivation on employee performance with work discipline as a mediating variable. *Management Science Letters*, 10(5), 1037-1044.
- PPATK. (2020, August 29). Tugas dan Fungsi PPATK. hal. https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=779
- Prasetyo, A. G., Suhardjanto, D., Hananto, S. T., & Setiawan, D. (2021). Legislative oversight and public sector corruption: Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Public Policy*, 14(2), 205-223.
- Purwanto, E., Suhardi, D. A., & Ramdani, R. (2020). The effect of work motivation and work discipline on employee performance with organizational commitment as intervening variables. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(7), 1037-1055.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *UU RI No 8 Th 2010*, hal. <https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/209/undang-undang-nomor-8-tahun-2010-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang#:~:text=Undang%2DUndang%20Nomor%208%20Tahun,Pelaporan%20dan%20Alalisis%20Transaksi%20Keuangan>.
- Rahmanurrasjid, A., Sulistiyono, A., & Rifai, A. (2021). The role of financial intelligence unit in eradicating money laundering crime. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 912-920.
- Saputra, I. G., Purnawan, A., & Karjoko, L. (2019). Coordination model among government agencies in eradicating money laundering in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(5), 1-7.
- Setiyono, B., & McLeod, R. H. (2019). Transparency and accountability in Indonesia's fight against corruption: The roles of KPK and PPATK. *Journal of Political Science*, 27(2), 186-203.
- Siahaan, N. H. (2016). *Money laundering & kejahatan perbankan*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Sihombing, S. O., & Rahardjo, S. N. (2019). Analysis of money laundering detection using data mining approach. *Diponegoro International Journal of Business*, 2(1), 23-32.
- Sofi, K., & Mutiarin, D. (2018). Collaborative Governance in the Management of Village Owned Enterprises Ponggok Sub District Polanharjo District Klaten Central Java 2016. *Journal of Government and Civil Society*, doi.org/10.31000/jgcs.v2i2.1028.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sujana, E., Yasa, I. N., & Wahyuni, M. A. (2020). Testing of fraud diamond theory based on local wisdom on fraud behavior. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(3), 4002-4006.
- Sukmana, O. (2019). Penguatan peran PPATK sebagai financial intelligence unit dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Rechtsvinding*, 8(1), 69-86.
- Titscher, S., Meyer, M., Wodak, R., & Vetter, E. (2000). *Methods of Text and Discourse Analysis*. London: SAGE Publications.
- Tracy, K., & Robles, J. S. (2013). *Everyday talk: Building and reflecting identities*. New York: Guilford Press.
- Tracy, S. J., & Hinrichs, M. M. (2017). Big Tent Criteria for Qualitative Quality. *The International Encyclopedia of Communication Research Methods*, <https://doi.org/10.1002/9781118901731.iecrm0016>.

- Wahyuni, S., & Hasanah, L. (2021). Organizational communication and employee performance: The role of leadership style. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 197-205.
- Widiastuti, N. P., Sukoharsono, E. G., Irianto, G., & Baridwan, Z. (2019). The influence of good public governance and anti-corruption education on corruption prevention behavior. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 9(4), 155-171.
- Widodo, T. (2017). Peranan PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 108-127.